

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan dari negara demokrasi, diman pemilihan umum ini dilakukan untuk menentukan siapa pimpinan daerah yang akan datang dan siap menjalankan sistem pemerintahan. Menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dimana setiap warga negara bebas memilih dan di pilih dalam setiap pemilihan yang di selenggarakan, mereka berhakmemilih siapa saja calon pemimpin masa depan serta mereka, serta setiap orang bebas untuk mencalonkan diri mereka Tricahyono (dalam Labolo 2015: 50).

Pemilihan umum kepala daerah serentak pada tahun 2017 di ikuti oleh 101 daerah baik ditingkat kota, kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Pemilihan kepada daerah yang dilakukan serentak pada tanggal 15 Febuari 2017 di ikuti oleh beberapa daerah yang terdiri dari 18 kota, 76 kabupaten dan 7 provinsi. Ketuju provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka, Sulteng, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Banten dan DKI Jakarta (Liputan6.com, 15 Febuari 2016).

Berbicara kampanye politik yang dilakukan pada saat pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, tentu hal ini tidak asing lagi bahkan problematika pemilukada DKI Jakarta semakin memanas setelah beredar berita

tentang dugaan kasus penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hal ini terjadi bermula ketika mantan politikus partai Golkar dan Gerindra ini melakukan kunjungan kerja di kepulauan seribu pada 27 September 2016 lalu, di mana Ahok menggelar dialog dengan masyarakat setempat.

Di dalam video resmi pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui youtube Ahok meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah jika dirinya tidak terpilih kembali. Namun ia menyelipkan Surat Al-Maidah ayat 15 ternyata kalimat yang disampaikan menuai polemik, semua media online bersama media NKRI menyebarkan video tersebut melalui media sosial. Hal itu juga memetik perhatian seorang dosen yakni Buni Yani, kemudian video tersebut di edit kembali dan diterjemahkan serta mengunggahnya kembali lewat facebook miliknya. Unggahan tersebut menjadi viral dan menimbulkan permusuhan bernuansa suku, agama, dan ras (merdeka.com, 30 Desember 2017).

Sementara itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan video Ahok telah menyinggung surat Al-Maidah 51 saat berbicara di pulau seribu adalah penistaan agama, MUI juga menyebutkan bahwa Ahok memiliki konsekuensi hukum. Fatwa tersebut membuat beberapa umat muslim lainnya ikut melaporkan Ahok ke kantor polisi yang menilai bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama melalui kata-kata saat kampanye. Kemudian di bawah pimpinan Muhammad Rizieq Syihab FPI menjadi garda terdepan dalam meminta aparat mengusut tuntas kasus tersebut, hingga pada tanggal 14 Oktober 2016 mereka menggelar demo di depan balai kota DKI Jakarta karena mereka merasa dikhianati pada saat itu tidak

di anggap maka mereka akan menggelar demo selanjutnya yang di berinama demo bela Islam jilid II yang di gelar 4 November 2016 atau yg sering di sebut gerakan 411.

Kemudian aksi ini tidak hanya sampai disitu saja setelah ahok ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan gerakan pengawal fatwa majelis ulama atau GNPf-MUI mendesak kasus Ahok segera di sidangkan. Selanjutnya aksi ini berlanjut pada tanggal 2 Desember 2016 atau di sebut 212, aksi 212 yang di monas dan meluas hingga bundaran HI ini merupakan aksi umat muslim terbesar sepanjang masa (Kompas.com, 18 November 2016).

MUI gerakan Islam dan umat mengambang karya Moch nur ichwan dalam jurnal Assyari Abdullah tentang komunikasi politik gerakan aksi bela Islam 212 antara politik identitas dan ijthad politik alternatif. Di dalam pemaparannya ichwan menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2016 indonesia di warnai dengan adanya Gerakan Aksi bela Islam (ABI). Gerakan ini di kenal dengan gerakan 411 dan 212 yang terjadi di bulan 4 november dan 2 desember tahun 2016. Gerakan 212 menjadi sorotan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang jumlahnya berdasarkan hitungan matematis berdasarkan googel sekitar 7 juta umat muslim bergabung menjadi satu dari berbagai daerah dan latar belakang organisasi pergerakan (Assyari Abdullah 2017:4).

Gerakan ini terjadi sebagai salah satu bentuk pembelaan terhadap agama islam, hal yang menjadi menarik disini adalah gerakan ini muncul seiring dengan adanya kampanye Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017 yang di ikuti oleh 3

pasangan calon yaitu Agus Herimurti Yudoyono-Sylvia, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)- Djarot Syaiful Hidayat, Dan Anies Baswedan Dan Sandiaga Uno. Pasangan pertama dan ketiga adalah pasangan muslim sedangkan pasangan ke dua muslin-non muslim (kompas.com 26 Oktober 2017).

Lembaga Survai telah merilih hasil survei tentang para calon pemilu di DKI Jakarta, dari hasil survei menunjukkan hasil yang berbeda-beda terhadap elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Meskipun begitu pasangan nomor urut 2 yakni Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat mendominasi keunggulan hasil survei yang dilakukan di mana pasangan pertahanan ini memiliki elektabilitas tinggi. Berikut beberapa lembaga survai yang merilis hasil survei bahwa Ahok lebih unggul di pilkada DKI Jakarta, sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

Pertama Saiful Mujani Research Center (SMRC) berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 14-22 Januari 2017 pasangan Ahok-Djarot mendapatkan elektabilitas sebesar 34,8%. Kemudian pasangan Anies-Sandi memperoleh 26,4%, sedangkan pasangan Agus-Sylviana memperoleh 22,5%. Dimana responden dalam penelitian ini adalah 800 orang dan dipilih dengan metode stratifiet multistage random sampling. Dimana margin of erornya kurang lebih 3,9 %. Survei ini juga mengungkapkan bahwa pasangan Ahok-Djarot dinilai lebih unggul dalam penampilan debatnya (Tempo.com, 29 Januari 2017).

Kedua Indikator Politik dimana dari hasil survei lembaga ini menunjukkan bahwa pasangan Ahok- Djarot lebih unggul dalam elektabilitas yakni sebesar

38,2%, kemudian pasangan Anies-Sylviana elektabilitasnya sebesar 22,1% dan Anies-Sandi memperoleh 22,7%. Dimana jumlah sampel yang digunakan adalah 808 orang atau warga Jakarta yang diwawancarai dan dipilih dengan menggunakan metode stratifiet multistage random sampling. Data yang dianalisis hanya 677 atau sekitar 86,3% dengan margin eror 3,8%. Survei ini juga melihat ada peningkatan dukungan yang konsisten pada pasangan Ahok-Djarot. Secara spontan, dukungan terhadap Ahok meningkat sekitar 4,3 persen menjadi 29,8 persen. Sementara dukungan terhadap Agus cenderung stagnan di kisaran 20-21 persen. Begitu juga dengan Anies yang berada di kisaran 16-18 persen (Tempo.com, 29 Januari 2017).

Tiga survei Alvara Research Center dari penelitian ini memiliki 1.200 responden yang mengikuti survei yang dilakukan lembaga ini, 34,8 % di antaranya memilih pasangan petahana Ahok-Djarot. Sedangkan 31,8% memilih pasangan nomor urut satu, Agus-Sylvi. Pasangan Anies-Sandi mendapat 22,2 % suara dan 11,3% responden menyatakan belum memutuskan pilihan. Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan 1200 responden warga Jakarta di 120 kelurahan yang memiliki hak pilih. Lokasi survei di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu. Survei dilakukan pada 11-17 Januari 2017 dengan metode multi-stage random sampling. Jumlah sampel margin error sebesar 2,8%, dan tingkat kepercayaan survei sebesar 95%. Menurut survei ini, pemilih Ahok-Djarot dinilai sebagai pemilih yang paling solid. Kemungkinan besar pilihan mereka tidak akan berubah sampai pada hari pemilihan nanti (tempo.com, 29 Januari 2017).

Dalam data survei di atas sangat menarik jika di kaji lebih dalam ketika hasil survei pasangan Ahok-Djarot lebih unggul namun pada pemilihan putaran kedua Ahok-Djarot memperoleh suara 42,04% kalah unggul dari pasangan Anies-Sandi dengan perolehan suara 57,96% suara. Dari hal ini dapat kita lihat perbandingan sebelum dan sesudah adanya kasus penodaan agama oleh Ahok yang diikuti dengan adanya aksi bela Islam atau yg sering di sebut aksi damai 212 sebelum pemilihan kepala daerah berlangsung hal ini tentu memiliki dampak dan pengaruh besar bagi masyarakat DKI Jakarta dalam menentukan pilihannya (KPU.Jakarta.go.id).

Banyak pihak juga menilai bahwa kemenangan pasangan Anies-Sandi dalam pemilukada DKI Jakarta sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta adalah produk hasil aksi massa ketika pilkada di Jakarta. Sebagaimana telah di ungkapkan secara terbuka oleh ketua dewan pimpinan pusat partai keadilan sejahtra (PKS) Mahdani Ali, menggunakan salah satu strategi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan momentum aksi 212. Dimana dalam menarik masa atau suara baru ini pasangan Anies –Sandi menggunakan dua siasat yang pertama dengan merubah penampilanya yang sebelumnya tidak berpeci menjadi memakai peci. Kemudian sisat kedua iyalah menemui imam besar FPI Habib Rizieq yang merupakan indicator aksi 212. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Reni Suwarso menilai kehadiran Anies pada reuni 212 sebagai salah satu bentuk ucapan terimakasih (kompas.com, 14 Desember 2016).

Peneliti memilih Jakarta untuk menjadi bahan pembahasan karena pilkada Jakarta ini sangat menarik dibandingkan dengan pilkada di daerah yang lain, dimana Jakarta selain menjadi ibukota Indonesia, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok ini yang memicu munculnya gerakan 212 atau gerakan bela Islam dalam hal ini banyak tokoh agama, ulama bahkan orang-orang besar politik atau partai politik ikut serta dalam aksi damai (gerakan 212) yang dilakukan 2 Desember 2016 lalu (Tribunnews.com, 2 Desember 2016).

Gerakan 212 atau yang sering disebut aksi damai bela Islam ini menunjukkan sebuah fenomena baru yang layak dan menarik untuk diteliti, dalam waktu yang bersamaan dengan pemilu Jakarta Aksi damai gerakan 212 ini menunjukkan sebuah kebangkitan ideologi di Indonesia di mana masyarakat dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang baik masyarakat biasa, elit, tokoh masyarakat, ulama dan politikus, artis dan masih banyak organisasi lainnya yang ikut serta meramaikan aksi damai di Jakarta tersebut. Dari latar belakang permasalahan di atas maka penelitian kali ini tertarik membahas lebih dalam mengenai Bagaimana Pergerakan Alumni 212 Dalam Mendukung Kemenangan Pasangan Anies-Sandi Pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017?

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas maka peneliti memiliki rumusan masalah Bagaimana Pergerakan alumni 212 dalam mendukung kemenangan Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

C. TUJUAN

Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui Bagaimana pergerakan Alumni 212 dalam mendukung kemenangan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Mengembangkan kajian tentang Bagaimana pergerakan alumni 212 dalam mendukung kemenangan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

2. Manfaat Praktis

- 1) Menyediakan bahan informasi kepada pemerintah kota Jakarta tentang Bagaimana pergerakan Alumni 212 dalam mendukung kemenangan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dalam pemilu pada DKI Jakarta tahun 2017.
- 2) Memberikan Informasi kepada pihak lain dalam penyajian informasi jika mengadakan penelitian yang hampir serupa.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan penulis mengungkapkan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Tujuan dari kajian pustaka untuk menemukan sisi menarik atau hal lain dari penelitian yang dilakukan serta memberikan gambaran perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, berikut ini beberapa tinjauan pustaka dengan pengelompokan sesuai dengan gerakan sosial baru, lama dan gerakan sosial islam atau islami sebagai berikut:

Kelompok gerakan sosial baru dalam pustaka terdahulu seperti penelitian Susanto (2015), dalam penelitian membahas tentang konsep kepemimpinan dan struktur sosial. Melalui pendekatan historis, dengan metode observasi partisipasi (participant observation) di lapangan, penelitian menyimpulkan, bahwa sejarah perjuangan Petani Banjarnayar memiliki dinamika yang asli, dan teori ekonomi politik dengan tujuan memperjuangkan lahan pertanian di desa Banjarnayar.

Selain itu juga dijelaskan dalam penelitian Darmastiti, (2016) dalam penelitian gerakan sosial ini mengungkapkan salah satu cara untuk merangkul orang-orang di Sukolilo adalah dengan menggunakan strategi komunikasi, yang disebut 'gethok tular'. Ini adalah strategi komunikasi berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh komunitas Samin.

Senajutnya penelitian yang hampir sama masih terkait dengan gerakan sosial buruh yakni penelitian Putra, (2017) dalam penelitian menjelaskan dinamika perjalanan warga dalam melakukan perlawanan sangat kompleks terhadap

PT.semen Indonesia. Hal tersebut karena gerakan perlawanan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam menolak pembangunan warga menggunakan tiga tahapan yaitu tahapan pra kondisi, tahapan perlawanan jalur hukum, dan tahapan pasca putusan MA.

Selanjutnya penelitian yang hampir sama terkait gerakan sosial namun yang membedakan adalah gerakan sosial buruh dan gerakan sosial mahasiswa yang dilakukan Arsyad, (2017) dalam penelitian dijelaskan bahwa gerakan mahasiswa atasnama BEM UMY merupakan gerakan populis di mana gerakan tersebut dilakukan atas dorongan memperjuangkan kepentingan orang banyak atau masyarakat. Ada 4 isu yang menjadi kritikan BEM UMY terhadap pemerintah Jokowi yaitu: kenaikan harga BBM, kebijakan dalam negri, kebijakan luar negri, dan kebijakan moneter serta fiskal.

Kemudian penelitian yang hampir sama yakni penelitian dari Akbar, (2017) dalam penulisan melihat suatu gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan yang memiliki peranan strategis untuk menjadi penguat gerakan-gerakan perlawanan yang ada di masyarakat, sebagai salah satu bentuk perlawanan untuk memperjuangkan hak dan memperjuangkan demokratis, keadilan serta pembebasan rakyat. Gerakan perempuan dalam hal ini iyalah pergerakan yang mengenaisebuah perlawanan para Srikandi yang tinggal dan hidup di sekitar Pegunungan Kendeng, yang setiap harinya melakukan aktivitas bersama alam sekitar.

Dan kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lofland (2017) lebih membahas terkait dengan realitas yang di anut dalam masyarakat hanyalah satu kenyataan dimana realitas istimewa yang mengesampingkan banyak orang. Membahas lebih dalam terkait dengan realitas pembrontak organisasi gerakan sosial .

Selanjutnya penelitian oleh Purboningsih, (2015) dalam penelitian lebih membahas tentang tentang proses terbentuk-nya kelompok relawan sebagai sebuah gerakan sosial baru dan mendeskripsikan proses terbentuknya kelompok relawan serta meng-analisa dalam perspektif kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, kelompok relawan dilatar bela-kangi oleh kegelisahan dan kekecewaan terhadap kebijakan atau pemerintahan terdahulu. Relawan politik bertujuan untuk mendu-kung calon presiden Joko Widodo. Kedua, berdasarkan perspektif kritis, faktor tindakan individu maupun kelompok melakukan kegiatan sukarela dengan menggunakan kesadaran rasional.

Kelompok Kajian pustaka gerakan sosial lama sebagaimana dalam penelitian penelitian Smith (2014) yang mengungkapkan bahwa solidaritas di Polandia, anti apartheid di Amerika serikat masing-masing gerakan ini didorong oleh kekuatan dan di topang oleh komitmen banyak individu dan organisasi yang diologinya dibentuk didukung oleh keyakinan agama.

Selanjutnya penelitian yang hampir sama terkait tentang gerakan sosial lama yakni penelitian oleh Joseper (2014) lebih memberikan panduan unik dari kasus, konsep, dan bacaan penting memberikan artikel dari bacaan di seluruh

dunia. Seperti mengungkapkan penelitian baru gerakan konteporer di Amerika. Selain itu juga menawakan devinisisi angkat dari istilah-istilah kunci, serta biografi aktifis terkenal dan lainnya. Dan penelitian Findji (2018) dalam penelitiannya lebih membahas gerakan otoritas pribumi dimana kolombia di percaya dengan reformasi konstitusi.

Kelompok kajian pustaka gerakan sosial Islam sebagaimana dalam penelitian Ilham, (2015) dalam penelitian menjelaskan kaum Elit di muhammadiyah DIY telah berperan didalam menentukan salah satu calon anggota DPD-RI perwakilan daerah DIY. Selain mekanisme sosialisasi bakal calon melalui struktur organisasi di muhammadiyah, elit politik muhammadiyah juga melakukan sebuah sosialisasi dimedia cetak seperti membuat kartu tanda pengenal, leaflet dan sepanduk. Selain itu juga melakukan sosialisasi dengan menggunakan metode manajemen isu dalam menghadapi isu yang muncul di permukaan.

Selanjutkan kajian yang sama rekait gerakan sosial Islam oleh Kurnia, (2017) dalam penelitian lebih membahas pemberitaan yang ada dalam kedua media online tersebut isu dalam gerakan sosial islam melalui media seperti apa yang paling sering muncul baik dari kompas ataupun dari republika memiliki perbedaan dalam freming pemberitaannya.

Kemudian penelitian oleh Abdullah, (2017) dalam penelitian menjelaskan aksi bela Islam sebagai bentuk komunikasi ummat Islam dalam merepson penodaan agama yang dilakukan oleh gubernur non aktif DKI Jakarta sekaligus

menjadi salah satu bentuk jihad politik alternative dalam merespon ketimpangan yang dialami oleh ummat Islam.

Kemudian penelitian yang sama tentang gerakan Islam juga di lakukan oleh Najib, (2017) dalam penelitian di jelaskan aksi bela Islam konservatisme dan fragmentasi otoritas keagamaan. Dimana penelitian ini sama-sama membahas bela Islam dalam aksi 212 namun yang membedakan penelitian ini lebih ingin melihat perkembangan keagamaan di Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang hampir sam di lakukan juga oleh Izudin, (2017) didalam penelitian membahas lebih dalam terkait nalar islam progresif serta membahas gerakan sosial apakah yang pantas dapat dilakukan di tengah himpitan persoalan bangsa terkait eksploitasi sumber daya alam diman tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan satu regulasi metateori yang di peruntukan untuk kepentingan masyarakat.

Dan terkhir kajian tentang gerakan sosial Islam yang dilakukan oleh Jurdi, (2013) Gerakan sosial Islam dengan kemunculan eskalasi, pembentukan blok atau pemisahan politik, dan tipologi artikulasi di sebuah gerakan. Penelitian ini membahas lebih jauh tentang kemunculan eskalasi politik di sebuah lembaga.

Tabel 1.1 Ringkasan hasil penelitian terdahulu

No	Jenis Pengelompokan	Temuan/ Hasil
1	Gerakan Sosial Baru Susanto (2015), Darmastiti (2016), Arsyad (2017), Akbar	Gerakan sosial baru ini memperjuangkan pengawasan dan kontrol sosial, memiliki karakter utama yakni protes publik yang damai, serta mempengaruhi untuk

	(2017), Putra (2017), Lofland (2017), Purboningsih (2015)	membuat perubahan yang baru.
2	Gerakan Sosisl Lama Smith (2014), Joseper (2014)	Menuntut tatanan sosial masyarakat yang lebih sempurna, pedoman untuk perkembangan dalam bentuk tindakan kolektif, mengubah tatanan kehidupan sosial.
3	Gerakan sosial Islam Jurdi (2013), Muhammad (2015), Kurnia(2017), Najib (2017), Izudin (2017),	Gerakan ynag berbasis pada keyakinan iman dan identitas keislaman. Memiliki semangat kolektifitas, dapat melakukan aksi bersama, mengendalikan perubahan dapat mempengaruhi kebijakan.

Sumber: diolah oleh penulis (2018)

Dari daftar referensi yang ada di atas maka dapat disimpulkan penelitian tentang gerakan social atau lebih tepatnya analisis pergerakan alumni 212 dalam mendukung kemenangan Anies- Sandi pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah penelitian yang baru dan belum pernah di lakukan sebelumnya, walaupun ada beberapa tema yang sama tentang gerakan 212 namun fokusnya berbeda, kebanyakan penelitian sebelumnya adalah gerakan social seperti pergerakan buruh, pergerakan masyarakat dan pergerakan perempuan didesa atau gerakan sosial Islam yang pernah dilakukan di dalam penelitian sebelumnya yakni gerakan sosial Islam seperti gerakan muhammadiyah dan LSM yang islami.

Dimana gerakan sosial tersebut kebanyakan melakukan aksinya untuk kepentingannya kelompoknya sendiri buakan pergerakan social yang dilakukan dengan adanya kepentingan politik. Berbeda dengan penelitian kali ini di mana dalam penelitian ini dari semua organisasi atau LSM dan ormas Islam bergabung di satu

tempat untuk menjalankan aksinya yakni aksi bela Islam yang melambangkan kebangkitan ideologi masyarakat Indonesia dan saat itu pula bersamaan dengan berlangsungnya pemilu di DKI Jakarta tahun 2017.

F. KERANGKA TEORI

Dari topik penelitian ini setidaknya ada tiga jenis kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pertama teori tentang pergerakan, gerakan sosial, gerakan sosial islam dan tantangan tentang teori pemilihan umum. Secara spesifik kedua kerangka teori akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pergerakan Politik

Sebelum masuk membahas tentang pergerakan politik penulis akan membahas perbedaan gerakan dan pergerakan politik dimana munculnya pergerakan politik adalah inisiasi dari kata gerakan. Dimana gerakan dalam KBBI diartikan sebagai usaha atau kegiatan dalam sosial (politik dan sebagainya) sedangkan pergerakan sendiri diartikan kebangkitan untuk perjuangan atau perbaikan.

Pergerakan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui instrumen kelembagaan sosial, politik yang berbentuk organisasi atau komunitas atau sejenisnya. Gerakan yang dilakukan menjadi gerakan bersama yang fokus pada suatu isu atau masalah baik masalah sosial politik, lingkungan dan

sebagainya. Dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama yang dicapai dan terwujud secara efektif (Lutfi& Puspito 2012: 84).

Adapun pengertian pergerakan politik menurut Chonen (dalam Mahfud 2015: 5) adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh sekelompok individu atau terorganisir secara kelompok untuk mengubah (perubahan) atau mempertahankan (konservatif) unsur tertentu dari masyarakat yang luas.

Menurut Oberschall (dalam Haradi 2017: 10) dalam sebuah pergerakan politik itu sendiri dipengaruhi oleh keberadaan sumberdaya yang ada, dengan kata lain sumberdaya ini menentukan sebuah keberhasilan, kesinambungan bahkan kemunduran dan kehancuran dalam gerakan itu sendiri, ini menunjukkan betapa pentingnya mobilisasi sumberdaya dalam sebuah pergerakan. Sumberdaya yang dimaksud dalam teori ini adalah segala hal yang di buat, digunakan, dan dimiliki atau dapat dikatakan sumberdaya adalah segala hal yang menunjang gerakan sosial. Dimana dalam negara demokrasi memerlukan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai sebuah keberhasilan atau meraih kekuasaan seperti contoh dalam pemilu.

Menurut Kartasapura dan Kreimers (dalam Mahfud 2015: 5) pergerakan politik adalah kegiatan atau usaha kolektif yang berusaha untuk mengadakan sebuah sistem kehidupan yang baru. Dari teori ini maka dapat diambil suatu pengertian mengenai gerakan sosial politik adalah sebuah gerakan yang di lakukan oleh sekelompok orang untuk mengubah sesuatu, dimana perubahan dalam hal ini

tentu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat atau memberikan pengaruh dalam kebijakan publik.

Selain memberikan pengaruh pergerakan politik juga menimbulkan partisipasi masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Suharko (2006: 3) dimana gerakan sosial memiliki ragam yang variatif serta bisa memiliki partisipasi yang sangat sedikit hingga bisa juga ribuan hingga jutaan orang. Dimana partisipasi mengambil peran dalam aktifitas dan kegiatan politik negara.

Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Menurut Jenkins & Kalandermans (dalam Manalu, 2007: 38-39) pergerakan juga berperan dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku, dalam bentuk-bentuk aksi, maupun orientasi politik publik.

Dari teori yang dipaparkan oleh Kartasaputra & Kreimers, dan teori yang dipaparkan oleh Suharko maka penulis menyimpulkan 2 hal yang penting yang dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan alumni 212 yakni *pertama* Peran, dimana dalam peran pergerakan ini penulis akan lebih fokus pada teori modalitas sosial dan kemudian mengaitkannya dengan Jaringan sosial untuk menganalisis, kemudian yang *kedua* Pengaruh dalam pengaruh/ intervensi ini penulis akan memaparkan teori pengaruh/ intervensi kemudian penulis juga akan lebih fokus pada pengaruh intelektual atau tokoh untuk menganalisis, kedua hal tersebut akan dijelaskan dengan beberapa teori sebagai berikut:

a. Peran dalam modal sosial

Menurut Robert (1993 :7) Modal sosial dapat berupa norma-norma sosial seperti kepercayaan, dan jaringan sangat berkontribusi untuk memperbaiki intitusi demokrasi. Modal sosial dalam masyarakat akan menguntungkan dan mendorong mereka untuk lebih mudah bekerja sama dan membangun pertemnan. Jika modal sosial ini kuat maka, institusi-institusi sosial dan politik akan berfungsi dengan baik dan proses demokrasi tentunya akan berjalan dengan tepat juga.

Menurut Bourdieu (dalam Syahra, R. 2003: 3) modal sosial yakni keseluruhan sumberdaya yang tergabung dalam sebuah kelompok atau organisasi, didasarkan pada prinsip memiliki rasa saling percaya dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma untuk saling membantu untuk mencapai sesuatu tujuan bersama.

Yang dimaksud mobilisasi dalam penelitian ini ialah modal sosial dimana modal sosial ini adalah salah satu hal yang paling berpengaruh dalam konteks politik, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bourdieu (dalam Maria, S. 2012: 14) modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala hal baik berbentuk barang atau berupa materiil maupun simbol, dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Dalam memobilisasi masa tentu sebuah gerakan sosial memerlukan sebuah unsur-unsur pokok seperti jaringan dan kepercayaan sebagaimana yang dipaparkan oleh Robert maka dalam analisis penelitian ini akan menganalisis

terkait jaringan dan kepercayaan dalam sebuah gerakan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jaringan

Jaringan sosial adalah sebuah pola koneksi dalam hubungan sosial individu, kelompok dan berbagai bentuk kolektif lainnya. Kemampuan seseorang atau kelompok dalam melibatkan diri di sebuah jaringan atau sebuah hubungan sosial merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun modal sosial. Pada saat seseorang mengabungkan diri dalam jaringan sosial dan menyinergiskan kekuatannya maka secara langsung maupun tidak, ia telah menambahkan kekuatan ke dalam jaringan tersebut. Sebaliknya, dengan menjadi bagian aktif dalam suatu jaringan, seseorang akan memperoleh kekuatan tambahan dari jaringan tersebut Hasbullah (dalam Yanto (2013: 37).

Jaringan sosial merupakan sebuah jaringan antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok individu lainnya. Hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk hubungan yang formal maupun bentuk hubungan informal. Hubungan sosial adalah sebuah gambaran atau cerminan masa depan dalam menjalian kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprosikal. Dalam melihat aktivitas sekelompok individu itu menjadi suatu

aksi sosial maka disitulah teori jaringan sosial berperan dalam sistem sosial Damsar, (dalam Fatkur (2015: 25).

2. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan merupakan sebagai dari sebuah harapan yang timbul dari masyarakat dimana semua anggota harus bertindak dalam batas norma, dengan keteraturan, kejujuran, dan kerjasama, kepercayaan mengandung suatu sikap yang menganggap bahwa individu atau kelompok bermaksud baik, adil dan sesuai dengan norma etika Yilmaz & Atalay (2009:2).

Hasbullah (dalam Yanto (2013: 37) mengungkapkan bahwa “rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung”. Rasa percaya akan menjadi sebuah pilar untuk kekuatan dalam sebuah modal sosial. Seseorang pasti akan mau berbuat atau melakukan sesuatu apaun itu untuk orang lain kalau ia yakin bahwa orang yang dia percayai tersebut akan membawanya ke arah yang menurutnya baik atau yang lebih baik dan ke arah yang diinginkan.

b. Pengaruh

Menurut kamus bahas Indonesia pengaruh adalah sebuah daya yang ada atau timbul dari sesuatu hal (orang yang berbeda) yang ikut membentuk perilaku, atau memberikan rasa kepercayaan, serta mampu membuat perubahan pada perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu kekuatan yang besar yang timbul dari sesuatu baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang berada di sekitarnya.

Menurut Weber & Kalberg (dalam Prasetijo 2015: 69) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh yang mendorong perubahan sosial di dalam masyarakat seperti faktor etika dan nilai budaya yang menjadi acuan, kemudian kaum intelektual seperti tokoh atau pemimpin (*leader*) yang menjadi contoh panutan dan menyebarkan gagasan tentang modernisasi, menjadi pendorong perubahan sosial tersebut.

Menurut Hafied (dalam Pradekso & Yulianto (2014:10) adalah perbedaan apa yang di pikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Perubahan sikap ialah adanya perubahan internal pada diri seseorang yang di organisir dalam bentuk prinsip, sebagai bentuk evaluasi yang dilakukanya terhadap suatu objek yang terdapat dari dalam atau luar dirinya, perubahan perilaku ialah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan.

Berangkat dari teori Weber & Kalberg maka dalam penelitian ini akan menyimpulkan dua faktor penting yang dapat mempengaruhi perubahan sikap

ataupun perbuatan seseorang yakni kaum intelektual dan penulis akan mengfokuskan pada pengaruh tokoh/ pemimpin dan aktivis dalam gerakan sosial dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tokoh

Menurut Azhari (dalam Petra, 2015: 12). Mengungkapkan intervensi atau pengaruh merupakan suatu tindakan campur tangan yang dilakukan oleh negara atau kepala negara lain, baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik maupun bidang kemasyarakatan lainnya. Pada kegiatan yang ada di birokrasi ataupun yang ada di bidang politik.

Menurut Wolf (dalam Prasetijo 2015: 67) mengatakan bahwa peran pemimpin atau leader adalah sangat krusial untuk memberikan dorongan ataupun perubahan, karena pemimpin atau leader dapat memberikan dorongan kesadaran yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Bourdieu (dalam Prasetijo 2015: 68) mengatakan bahwa ada kondisi yang dibangun oleh orang yang punya kuasa untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya dimana ada semacam yakin dengan yang di tanamkan kepada kelompoknya akan sebuah perubahan akan didapatkan.

2. Aktivist

Aktivist menurut kamus ilmiah populer (dalam Hidayat 2017: 9) adalah orang yang atif (menjadi anggota) atau organisasi, pendorong suatu kegiatan. Aktivist adalah orang yang giat bekerja untuk kepentingan suatu organisasi massa lain. Iya mengabdikan tenaga dan pikiranya bahkan seringkali mengorbankan tenaga, harta bendanya untuk mewujudkan cita-cita organisasi (Kemdikbud.go.id)

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) aktivis adalah seseorang yang tergabung atau menjadi anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan organisasinya (Aria 2011: 11).

Menurut Mayo (dalam Prtra 2015: 12-13) mendefinisikan ada tiga tingkatan dalam intervensi atau pengaruh komunitas (*community work*) yang menggambarkan dimana intervensi dapat diterapkan hal tersebut di jelaskan sebagai berikut:

- a) *Grassroot* ataupun *neighbourhood* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut),
- b) *Local agency* dan *inter-agency work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi payung di tingkat lokal, provinsi ataupun di tingkat yang lebih luas, bersama jajaran pemerintah yang terkait serta organisasi non-pemerintah yang berminat terhadap hal tersebut),

c) *Regional* dan *national community planning work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap isu terkait).

2. Gerakan Sosial dalam Islam

Gerakan sosial Islam merupakan jalan alternatif menghadirkan Islam pada realitas untuk menjawab problem-problem sosial yang terjadi. Sebagai gerakan, Islam harus berbasis pada iman seseorang menjadi akan di minta pertanggung jawaban di hadapan tuhan yang. Islam merupakan pernyataan sikap kelompok yang diumumkan kepada publik dan sering bermuatan politis (Qodir 2008: 4).

Islam secara kronologis seperti apa yang disampaikan Fajar (dalam Ari Susanto 2017: 65) yakni sebuah agama yang memiliki peran utama yaitu menanamkan prinsip ketuhanan (Monotheisme) kemudian memiliki peran sekunder dalam membangun keadilan sosial ekonomi. Disinilah islam memiliki makna yang luas, di satu sisi memiliki peran untuk menanamkan keyakinan dalam bertuhan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan di sisi lain Islam memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun kedamaian umat manusia di bumi ini. Dari sisi munculistilah bagaimana kita memiliki dua hubungan yakni kepada Allah (hablu minallah) dan hubungan sesama manusi (hablu minannas) dan dari kedua hubungan tersebut akan di mintai pertanggung jawabannya.

Menurut (Kuntowijoyo 1997: 27) yang mengatakan bahwa Islam tidak hanya sekedar agama namun juga sebagai komunitas (umat). Banyak orang Islam yang tidak menyadari hal ini, kebanyakan orang Islam melihat Islam adalah agama

yang individu dan lupa bahwa Islam juga merupakan kolektifitas. Dalam hal ini semangat kolektifitas memiliki pengertian bahwa adanya kesadaran, struktur dan mampu melakukan aksi bersama.

Sebagai seorang muslim pedoman utama yaitu Al- Quran dan sunnah harus dihayati (*internalisasi*) kemudian diekspresikan dalam sebuah komunitas. Disaat seseorang hanya berada dalam tahapan internalisasi, kebanyakan mereka menganggap bahwa agama adalah urusan perorangan baik dalam penghayatan maupun pelaksanaan bersama, atau bersifat cair tidak menjadi kekuatan utama.

Dari teori diatas menunjukkan bahwa gerakan keagamaan sendiri tidak lepas dari gerakan sosial atau menjadi salah satu dari gerakan sosial. Gerakan sosial Islam atau bisa juga disebut dengan gerakan keagamaan baru dalam konsep utama merupakan suatu gagasan yang berusaha menterjemahkan ide-ide keagamaan menjadi kekuatan transformatif untuk menumbuhkan struktur dan tatanan sosial yang baru yang lebih baik, partisipatif, terbuka dan emansipatoris Raharjo (dalam Qodir & Singh 2015: 24-25).

3. Teori Pemilihan Umum

Berikut ini kerangka teori tentang pemilu yang mana dalam penelitian ini akan membahas secara spesifik yang pertama tentang pemilihan umum, kedua tentang jenis-jenis pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

Tricahyono (dalam Labolo 2015: 50) Pemilihan umum merupakan sebuah instrumen untuk mewujudkan sebuah kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebagaimana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka pemilu di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.

Menurut (Abdullah 2009: 168) mengungkapkan bahwa Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam pemilihan umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut hak pilih, yang terdiri dari: Hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah pernah menikah, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.

a. Jenis –Jenis Pemilu

Jenis-jenis pemilu sebagai berikut :

- 1) Pemilu presiden dan wakil presiden

Pemilihan umum ini dilakukan dengan tujuan untuk memilih orang yang mampu memimpin negara yaitu presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan

kehendak rakyat yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden.

2) Pemilihan umum anggota lembaga legislatif

Menurut manfaat uud republik indonesia undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa pemilihan umum anggota legislatif merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten atau kota dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945.

3) Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada)

Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah atau yang dikenal dengan pilkada secara langsung pada tahun 2007 yang tergabung dalam pilkada seperti struktur organisasi pemerintahan kecamatan dan struktur organisasi pemerintahan desa. Akan tetapi sejak diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat yaitu melalui Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah atau yang disingkat dengan Pilkada atau Pemilukada.

b. Fungsi dan Tujuan Pemilihan umum

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose & Mussawir (dalam Labolo 2015: 52) antara lain:

- 1) Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung,
- 2) Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara atau pemerintah,
- 3) Berometer dukungan rakyat terhadap penguasa,
- 4) Sarana rekrutmen politik,
- 5) Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Sedangkan menurut Asshiddiqe (dalam Labolo 2015: 56) tujuan dari penyelenggaraan pemilu yaitu:

- a) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai
- b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan
- d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

c. Pemilihan kepala daerah (PILKADA)

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat (DPRD). Sementara itu,

yang dimaksudkan dengan kepala daerah menurut undang-undang ini adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. dengan mengingat tugas dan wewenanga DPRD menurut undang-undang no 22 tahun 2003 tentang susnan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan raryat dearah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan konsep politik yang merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokrasi melalui pemilu, tetapi juga sebagai bentuk implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dibuktikan dengan adanya pemilihan yang langsung dan dilakukan oleh masyarakat serta di selenggarakan dengan jujur, adil dan aman.

Seperti yang diungkapkan Asri (dalam Harahap 2005: 122) mengatakan bahwa Pemilihan langsung merupakan sebuah tonggak demokrasi yang terpenting di daerah, tidak hanya di batasi pada mekanisme pemilihanya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya dimana pilkada merupakan ajang pembelajaran politik dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui Pilkada langsung rakyat lebih berdaulat dimana pemilihan kepala daerah sudah tidak lagi ditentukan oleh anggota DPRD namun sekarang rakyat mempunyai

hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri.

Menurut peraturan pemerintah (PP) RI nomor 6 tahun 2005 Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya di sebut dengan pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan pancasila dan UUD RI tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil walikota untuk kota.

G. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial. Melalui konsep penelitian diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian (event) yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

1. Gerakan sosial Islam adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok kepentingan dalam naungan sebuah organisasi islam atau ormas Islam tertentu untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

2. Pilkada adalah suatu bentuk pemilihan secara langsung yang dilakukan masyarakat untuk memilih pemimpin baik di tingkat provinsi, daerah, kabupaten atau kota.
3. Alumni 212 adalah sekelompok orang yang bergabung dalam sebuah kelompok masyarakat, lembaga, LSM, Ormas Islam, tokoh agama yang ikut serta dalam aksi damai bela Islam pada tanggal 2 Desember 2016.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka penulis menginterpretasikan ke dalam operasional konsep. Hal ini dilakukan agar lebih terfokus dan terarah pada permasalahan yang akan di analisis.

1. Pergerakan Politik

a. Peran modalitas sosial

1) Jaringan

Jaringan merupakan sebuah pola koneksi yang luas dalam hubungan sosial individu, kelompok dan berbagai bentuk kolektif.

2) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu sikap untuk mempercayai individu dan kelompok dengan tingkatan tertentu yang saling berhubungan untuk menjalin kerja sama.

b. Pengaruh

1) Tokoh

Kaum intelektual adalah seseorang yang mempunyai kuasa dan dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu sesuai dengan apa yang di kehendaknya.

2) Aktivis

Aktivis adalah seseorang yang tergabung dalam sebuah organisasi organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan berperan aktif dalam kegiatan baik di luar maupun di dalam organisasi.

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat kepustakaan atau *library research*. Kemudian di perkuat dengan wawancara anggota FPI Yogyakarta dan aktivis mahasiswa alumni 212 yang ada di Yogyakarta. Tujuan dari wawancara ini sebagai data pendukung untuk memperkuat data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Menurut Nazier (dalam Sinaga, 2017 :37) Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahan terhadap buku-buku, literature-literature, catatan-catatan dan laporan laporan yang ada hubungan nya dengan permasalahan yang akan di pecahkan. Studi pustaka

merupakan langkah yang penting dimana setelah seseorang peneliti menentukan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang terkait dengan teori yang berkaitan dengan topik peneliti. Dalam pencarian teori peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana Penelitian studi kasus (*case study*) dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan opini manusia Polit & Beck (2004). Subjek dalam penelitian dapat berupa individu, group, instansi, ataupun masyarakat. Dalam proses penelitian terdapat beberapa langkah yaitu menentukan masalah, memilih desain dan instrumen yang sesuai, mengumpulkan data, menganalisis data yang di peroleh dan menyiapkan laporan hasil penelitian.

Metode penelitian studi kasus (*case study*) merupakan salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab beberapa issue atau sebuah objek atau fenomena terutama dibidang ilmu sosial. Misalnya pada cabang ilmu sosiologi, penelitian kasus digunakan sebagai desain penelitian kuantitatif untuk mengevaluasi kejadian atau situasi dalam dunia nyata (*real situation*) Sinaga (2017: 37).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah bahan-bahan tulisan ataupun non tulisan. Dalam penelitian kepustakaan atau *library research* ini sumber data yang sumber data yang di peroleh dikumpulkan, dengan cara mencari, memilih, memilah, dan menganalisis data-data literature yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian akan di perkuat dengan wawancara langsung dengan pihak yang dianggap mampu memberikan jawaban dari penelitian yang di lakukan. Adapun data tersebut terdiri dari sumber data primer dan data sekunder yang di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer dalam penelitian ini iyalah data yang di peroleh dari berita online dan media yang kredibel dan bereputasi seperti tempo.com, kompas.com dan Republika.co.id. dan wawancara langsung dengan anggota FPI Yogyakarta dan aktivis mahasiswa alumni 212 yang ada di Yogyakarta
- 2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini iyalah sumber data yang di peroleh dari Website KPU Jakarta, wibsite BPS, Lembaga survei pemilu, jurnal-jurnal, buku-buku ilmiah yang sesuai dengan penelitian Sugiono (2010).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kepustakaan atau *library research*, maka teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam mengumpulkan data dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya, menggunakan sumber-sumber informasi yang kredibilitasnya sudah teruji, dan relevan dengan topik penelitian sebagai contoh

nya adalah buku-buku penelitian. Secara spesifik penelitian ini lebih fokus pada berita yang terkait dengan gerakan 212, dan kasus penistaan Ahok cagub DKI Jakarta 2017, serta polemik pilkada DKI Jakarta dari akhir September 2016 sampai April 2018.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan analisis deskriptif dimana data yang diperoleh dari berita online seperti kompas.com, tribun.co.id dan detik.com diklarifikasikan sesuai dengan jenisnya kemudian di perkuat selaraskan dengan data wawancara dan selanjutnya dijabarkan dengan mengfokuskan, mendistribusikan, mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis untuk memberikan penyajian dan memberikan bahan jawaban dalam penelitian (Suryana, 2010). Metode deskriptif analitif dalam penelitian ini yakni sebagai metode penelitian yang sembernya mencari, memilah kemudian dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan secara kritis kemudian disajikan secara sistematis dan menambahkan penjelasan yang saling berhubungan sehingga lebih mudah untuk di pahami dan disimpulkan. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran yang benar untuk objek peneliti Surakhmad (dalam Sinaga, 2017: 37).

5. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika seperti berikut:

Bab I pendahuluan di dalamnya mendiskripsikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik manfaat teoritis ataupun manfaat praktis dari penelitian yakni tentang Analisis pergerakan alumni 212 dalam mendukung kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga S. Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Selain itu juga di Bab I memaparkan tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian untuk memperkuat argumentasi penelitian.

Bab II Deskripsi objek penelitian adalah tentang gambaran umum dimana bab ini menjelaskan profil atau gambaran dasar lokasi atau objek yang sesuai dengan penelitian yang di lakukan, Bab ini memaparkan gerakan 212 dan Pilgub DKI Jakarta.

Bab III Hasil atau pembahasann adalah bab Pembahasan yang mana bab ini menguraikan semua hasil penelitian terkait Analisis pergerakan alumni 212 dalam mendukung kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga S. Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Bab IV Penutup adalah dimana dalam bab ini membuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.